

BAB II **MENEROPONG PENDIDIKAN KOTA PANGKALPINANG**

2.1 Pangkalpinang dalam Catatan Statistik

2.1.1 Kondisi Geografis

Pangkalpinang ialah satu di antara kawasan mandiri yang terletak di sisi timur pulau Bangka sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah melakukan pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan.



Sumber: Peta Tematik Indo, 2023

Landasan berdirinya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesudah penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang pemekaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga wilayah administratif pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbentuk menjadi enam kabupaten serta satu kota, dengan Pangkalpinang sebagai ibu kota provinsi.

Wilayah Kota Pangkalpinang terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan serta 42 (empat puluh dua) kelurahan, detail kecamatan dan kelurahan tersebut bisa diketahui dalam tabel di bawah:

Tabel 2.1.1
Luas Wilayah, Kecamatan dan Jumlah kelurahan Kota Pangkalpinang

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Kelurahan
1	Rangkui	Keramat	5,04	8
2	Bukit Intan	Air Itam	35,42	7
3	Girimaya	Sriwijaya	4,50	5
4	Pangkalbalam	Ketapang	4,72	5
5	Gabek	Gabek Dua	20,39	6
6	Tamansari	Gedung Nasional	3,19	5
7	Gerunggang	Bukit Merapin	31,14	6
Jumlah			104,5 km2	42

Sumber: BPS Kota Pangkalpinang, 2023

Mempunyai luas wilayah 104,5 km², Kota Pangkalpinang cuma seukuran 0,72% (nol koma tujuh puluh dua persen) dari keseluruhan luas wilayah provinsi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Pangkalpinang ialah wilayah kota/kabupaten terkecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kota Pangkalpinang, wilayah administratif dengan luas terkecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memiliki posisi strategis dari segi geografis dalam konteks pembangunan nasional dan provinsi. Ini disebabkan oleh statusnya sebagai ibu kota provinsi, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan di berbagai bidang. Dalam perannya sebagai pusat pengembangan regional bagi Provinsi Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang sudah terjadi sejumlah kemajuan yang signifikan. Hal ini dilihat melalui perkembangan fisik Kota Pangkalpinang serta berbagai dinamika sektor serta penduduknya. Di samping itu, Kota Pangkalpinang sudah mengalami perluasan wilayah pada tahun 2007. Perluasan ini berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2007 mengenai

Perubahan Batas Daerah Kota Pangkalpinang melalui Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang semula luasnya hanya 89,4 km² menjadi seluas 104,5 km².

Profil bentang alam di Kota Pangkalpinang secara umum menunjukkan kesamaan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terdiri dari dataran rendah dan tinggi. Terdapat kemiringan yang bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 20 hingga 50 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan berkisar antara 0 hingga 25 persen. Ketinggian Kota Pangkalpinang berkisar antara 0 hingga 70 meter di atas permukaan laut, dibagi menjadi lima kelas: 0-5 meter, 5-15 meter, 15-30 meter, 30-45 meter, dan 45-70 meter di atas permukaan laut.

Daerah yang memiliki ketinggian tertinggi yaitu Bukit Jurumudi menduduki dataran tertinggi di Kota Pangkalpinang. Sebagian besar wilayah Kota Pangkalpinang menunjukkan kontur yang bervariasi, mulai dari bergelombang hingga datar, dengan ketinggian berkisar dari 0 hingga 30 meter di atas permukaan laut. Sementara itu, wilayah lainnya dengan ketinggian antara 30 hingga 70 meter di atas permukaan laut berada di Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Bukit Intan, serta Kecamatan Gerunggang.

2.1.2 Kondisi Demografi

Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang menyatakan jumlah penduduk di Kota Pangkalpinang adalah 236.267 jiwa menyebar di 7 kecamatan. Total padat masyarakat di Kota Pangkalpinang berada pada

Kecamatan Gerunggang dengan 53.938 jiwa, Sementara itu, total penduduk paling kecil terdapat di Kecamatan Girimaya dengan 19.262 jiwa. Dari sekian ratusan ribu penduduk Kota Pangkalpinang, Penduduk laki-laki berjumlah 119.400 orang, sementara penduduk perempuan berjumlah 116.867 orang

Tabel 2.1.2
Jumlah Penduduk Kota Pangkalpinang
Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Kecamatan	Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Rangkui	19.662	19.361	39.023
2	Bukit Intan	21.352	20.701	42.053
3	Girimaya	9.613	9.493	19.106
4	Pangkalbalam	11.607	11.223	22.830
5	Gabek	18.279	18.072	36.351
6	Tamansari	10.292	10.173	20.465
7	Gerunggang	25.887	25.347	51.234
Jumlah		116.692	114.370	231.062

Sumber : BPS Kota Pangkalpinang, 2023

Dari tabel 2.1.2 menjelaskan persebaran keseluruhan penduduk di beberapa kecamatan Kota Pangkalpinang yang tersebut tidak diimbangi luas wilayah kecamatannya. Terlihat jelas pada Kecamatan Rangkui yang memiliki kepadatan penduduk ke-3 dari 7 kecamatan yang ada. Jumlah penduduk di Kecamatan Rangkui sebanyak 39.060 jiwa dengan luas wilayah hanya 5,02 km². Sedangkan Kecamatan Gabek dengan jumlah penduduk sebanyak 37.537 jiwa yang tersebar di luas wilayah sebesar 34,21 km² tidak mampu menandingi kepadatan di Kecamatan Rangkui yang memiliki luas wilayah yang terbilang cukup kecil. Fenomena ini menunjukkan masih adanya ketidakmerataan penyebaran penduduk di Kota

Pangkalpinang. Ini tentu dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain pusat perdagangan, pusat industri, pusat pemerintahan, fasilitas pendidikan dan lain sebagainya.

2.1.3 Pendidikan

Pendidikan merupakan indikator penting dalam kemajuan suatu bangsa. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah dapat ditentukan oleh sumber daya yang bermutu. Metode guna menambah mutu sumber daya itu dengan cara meningkatkan mutu pendidikan di wilayah tersebut, salah satunya meningkatkan prasarana maupun sarana yang dibutuhkan guna mendukung pendidikan. Apabila prasarana maupun sarana yang telah memadai pastinya kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan pun akan tinggi. Dalam melihat besaran kesempatan atau partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat dilihat menggunakan indikator, yaitu berupa Angka Partisipasi Murni (APM) maupun Angka Partisipasi Kasar (APK).

Tabel 2.1.3
Angka Partisipasi Sekolah Kota Pangkalpinang Tahun 2022

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni			Angka Partisipasi Kasar		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
SD/MI	99.55	99.55	96.90	108.02	106.95	106.37
SMP/MTs	75.71	75.19	76.65	86.80	85.15	93.45
SMA/SMK/MA	68.94	70.46	70.42	99.44	97.19	97.86

Sumber: BPS Kota Pangkalpinang, 2023

Secara pasti sumber daya manusia yang terdapat di Kota Pangkalpinang tidak dapat diketahui, tetapi yang ada merupakan gambaran berdasarkan penduduk yang telah 15 tahun ke atas berdasarkan tingkat pendidikan

terakhir yang sudah diselesaikan di Kota Pangkalpinang.

2.1.4 SMAN 1 Pangkalpinang

SMA Negeri 1 Pangkalpinang merupakan salah satu sekolah negeri unggulan yang terletak di Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1958 dan merupakan sekolah tertua di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. SMA Negeri 1 Pangkalpinang awalnya merupakan inisiatif dari Yayasan Pendidikan Rakyat Bangka (YPRB) pada tahun 1957. Saat ini, kepala sekolahnya adalah Efri Rantos, S.Pd.

Latar belakang sosial-ekonomi orang tua siswa di sekolah ini sangat beragam, meliputi pegawai negeri sipil, wirausaha, pedagang, dan petani. Sebagian besar orang tua siswa termasuk dalam golongan menengah ke atas. SMA Negeri 1 Pangkalpinang merupakan salah satu sekolah yang paling banyak mengirimkan perwakilan siswa dalam kegiatan nasional seperti Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), dan Olimpiade Sains Nasional (OSN). Melalui program pertukaran pelajar AFS dan YES, sekolah ini juga mengirimkan rata-rata satu hingga dua siswanya untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke luar negeri setiap tahunnya.

Tabel 2.1.4
Data Penerimaan Siswa Tahun Ajaran 2023/2024

No	Jenis Seleksi	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Zonasi	120	107	227
2	Prestasi Dalam Zonasi	13	22	35
3	Prestasi Luar Zonasi	10	20	30
4	Afirmasi	19	30	49
5	Mutasi	10	9	19
	Total	172	188	360

Sumber: Data SMAN 1 Pangkalpinang, 2023

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2023, jalur mutasi atau perpindahan tugas orang tua memiliki ketentuan khusus. Pertama, anak kandung dari guru yang mengajar di sekolah tersebut dapat diterima tanpa mempertimbangkan lokasi tempat tinggal mereka, apakah berada dalam zonasi sekolah atau tidak. Kedua, sisanya adalah anak dari anggota TNI yang dimutasi atau dipindahtugaskan. Sementara itu, pada jalur prestasi, penerimaan calon siswa didasarkan pada sertifikat prestasi yang mereka miliki. Namun, sertifikat prestasi tersebut harus diperoleh dari kejuaraan atau kompetisi yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Dengan demikian, terdapat kebijakan khusus yang memberi prioritas bagi anak kandung guru di sekolah tersebut pada jalur mutasi, terlepas dari lokasi tempat tinggal mereka. Di sisi lain, pada jalur prestasi, hanya sertifikat dari kejuaraan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang dapat diterima. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah favorit di wilayah tersebut, didukung oleh berbagai fasilitas yang memadai dibandingkan sekolah sekitarnya dan memiliki banyak prestasi. Daya tampung SMA

Negeri 1 Pangkalpinang mencapai 360 siswa.

2.1.5 SMAN 4 Pangkalpinang

SMA Negeri 4 Pangkalpinang merupakan salah satu sekolah menengah atas yang berlokasi di Jalan R. Hundani, Kecamatan Gabek, Kelurahan Ampui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1993. Kepala sekolah saat ini adalah Siti Rofiqoh, S.Pd. SMA Negeri 4 Pangkalpinang termasuk dalam kategori sekolah non-favorit di Kota Pangkalpinang. Latar belakang sosial-ekonomi orang tua siswa di sekolah ini sangat beragam, meliputi pegawai negeri sipil, wirausaha, pedagang, dan nelayan. Sebagian besar orang tua siswa termasuk dalam golongan menengah ke bawah secara ekonomi. Daya tampung SMA Negeri 4 Pangkalpinang adalah sebanyak 300 siswa.

Tabel 2.1.5
Data Penerimaan Siswa Tahun Ajaran 2023/2024

No	Jenis Seleksi	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Zonasi	28	25	53
2	Prestasi Dalam Zonasi	7	15	22
3	Prestasi Luar Zonasi	1	9	10
4	Afirmasi	105	95	200
5	Mutasi	7	8	15
	Total	148	152	300

Sumber: Data SMAN 4 Pangkalpinang, 2023

Berdasarkan data pada tabel 2.1.5, terlihat adanya perbedaan jumlah penerimaan peserta didik baru antara SMA Negeri 1 Pangkalpinang dan SMA Negeri 4 Pangkalpinang. Diketahui bahwa di SMA Negeri 1 Pangkalpinang terdapat lebih banyak pendaftar melalui jalur prestasi

dibandingkan dengan SMA Negeri 4 Pangkalpinang. Hal ini disebabkan karena SMA Negeri 1 Pangkalpinang merupakan sekolah favorit di Kota Pangkalpinang, sehingga banyak calon peserta didik yang memiliki prestasi lebih tertarik untuk mendaftar di sekolah tersebut.

2.2 Sistem Zonasi Kota Pangkalpinang

2.2.1 Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Penerimaan siswa baru (PPDB) untuk tahun pelajaran 2022/2023 dijalankan oleh setiap lembaga pendidikan SMA Negeri maupun SMK Negeri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlandaskan manajemen dengan basis sekolah yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan telah ditetapkannya petunjuk teknis dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 8 Tahun 2023 adalah untuk menjamin PPDB berjalan secara:

1. **Transparan**, maknanya dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru yaitu mudah diakses serta bisa dipahami seluas-luasnya oleh calon siswa maupun orang tua dan masyarakat luas;
2. **Akuntabel**, maknanya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggung jawabkan ke individu atau kelompok yang relevan dengan tugas dan wewenangnya.
3. **Obyektif**, artinya dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru agar dapat dilaksanakan menurut aturan yang telah ditentukan;

Pelaksanaan PPDB diorganisir oleh panitia di tingkat provinsi sebagai koordinator,

dan di tingkat satuan pendidikan sebagai pelaksana. Panitia di tingkat provinsi diangkat oleh Gubernur, dengan anggota panitia sebagai berikut:

Tabel 2.2.1
Susunan Panitia PPDB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

KEDUDUKAN	PELAKSANA
Pengarah	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Wakil Pengarah	Sekretaris Daerah
Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pendidikan
Ketua PPDB Jenjang SMA	Kepala Bidang Pembinaan SMA
Ketua PPDB Jenjang SMK	Kepala Bidang Pembinaan SMK
Seksi	1) Seksi Pelayanan 2) Seksi Pendataan 3) Seksi Informasi 4) Seksi Pengaduan

Sumber: Peraturan Gubernur Bangka Belitung No.22, 2023

Dalam penyelenggaraannya, PPDB tahun 2022/2023 memiliki beberapa ruang lingkup yang menjadi tugas panitia tingkat provinsi :

- a) Membuat serta menetapkan panitia PPDB;
- b) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyusunan regulasi PPDB;
- c) Membuat peraturan sebagai panduan dalam PPDB;
- d) Membuat serta menetapkan jadwal pelaksanaan PPDB;
- e) Menjalankan pelaksanaan PPDB;

- f) Menginformasikan aktivitas PPDB kepada Gubernur;
- g) Melakukan sosialisasi PPDB;
- h) Memberikan pelayanan pengetahuan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kepada warga;
- i) Menyelaraskan pengelolaan aduan sehubungan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- j) Melaksanakan pemantauan serta pengawasan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- k) Melakukan evaluasi pelaksanaan PPDB.

Panitia tingkat satuan pendidikan ditentukan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang dapat disesuaikan melalui kebutuhan masing-masing satuan pendidikan dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

**Tabel 2.2.1
Susunan Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan**

KEDUDUKAN	PELAKSANA
Penanggung jawab	Kepala Satuan Pendidikan
Ketua	Guru/Wakasek
Sekretaris	Guru/Wakasek
Seksi	1) Seksi Pelayanan 2) Seksi Pendataan 3) Seksi Informasi 4) Seksi Pengaduan

Sumber: Peraturan Gubernur Bangka Belitung No.22, 2023

Dalam penyelenggaraan PPDB tahun 2020/2021 ada beberapa ruang lingkup yang menjadi tugas panitia tingkat provinsi :

- a) Menyusun peta terkait minat siswa SMP dalam PPDB;
- b) Menjalankan sinkronisasi bersama pihak terkait dalam pelaksanaan PPDB;
- c) Membuat aturan sebagai acuan dalam PPDB;
- d) Mengukuhkan komite PPDB;
- e) Menjalankan penyelenggaraan PPDB;
- f) Melaksanakan sosialisasi mengenai PPDB;
- g) Memberikan servis informasi PPDB kepada masyarakat;
- h) Memberikan laporan aktivitas PPDB kepada Gubernur;
- i) Melakukan pengawasan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- j) Menyelaraskan penanganan keluhan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru.

Lingkup kerja komite di tingkat unit pendidikan:

- a) Menjalankan kampanye informasi PPDB di level regional;
- b) Menyelaraskan aktivitas penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru di lembaga pendidikan pada level regional;
- c) Merangkum daftar pendaftar calon siswa sesuai dengan sekolah yang mereka tuju dan pilihan jalur PPDB yang mereka pilih;
- d) Membantu dalam memfasilitasi akses informasi publik bagi masyarakat;

- e) Mengirimkan hasil rangkuman pendaftaran calon siswa yang telah disetujui ke sekolah yang mereka tuju;
- f) Mengirimkan hasil rangkuman pendaftaran calon siswa ke sekolah asal;
- g) Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di level regional;
- h) Menyelaraskan penanganan keluhan seputar Penerimaan Peserta Didik Baru di level regional;
- i) Menjamin terlaksananya proses PPDB di level regional

2.2.1.1 PPDB SMAN 1 Pangkalpinang

SMA Negeri 1 Pangkalpinang merupakan sekolah di bawah naungan pemerintah yang harus mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Peraturan ini mengatur sistem zonasi yang pelaksanaannya diawasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan pernyataan Kepala SMA Negeri 1 Pangkalpinang, permasalahan yang terjadi adalah banyaknya siswa yang tidak tertampung, terutama yang tinggal jauh dari sekolah, karena melewati kuota yang diterima. Hal ini membuat orang tua merasa keberatan dengan program sistem zonasi ini.

Daya tampung SMA Negeri 1 Pangkalpinang adalah 326 siswa. Pelaksanaan PPDB 2021/2022 di SMA Negeri 1 Pangkalpinang mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2023. PPDB dibagi menjadi empat

jalur:

- 1) Jalur Zonasi (75% dari daya tampung) memprioritaskan calon siswa dengan domisili terdekat;
- 2) Jalur Prestasi (15%) berdasarkan prestasi calon siswa seperti nilai rapor dan lomba/penghargaan;
- 3) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali (5%); dan
- 4) Jalur Afirmasi (5%) untuk keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas, baik dari dalam maupun luar wilayah zonasi.

2.2.1.2 PPDB SMAN 4 Pangkalpinang

Dalam pelaksanaan penelitian ini, selain dilakukan di Dinas Pendidikan, juga dilakukan di satuan pendidikan pada jenjang SMA Negeri. Terdapat dua sekolah yang menjadi lokus penelitian, yaitu SMA Negeri 1 Pangkalpinang dan SMA Negeri 4 Pangkalpinang. Secara khusus, SMA Negeri 4 Pangkalpinang menjadi pelaksana langsung kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur sistem zonasi. Daya tampung SMA Negeri 4 Pangkalpinang adalah sebanyak 300 siswa.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Pangkalpinang, penentuan jarak terdekat calon siswa ke sekolah dilakukan oleh panitia dengan menggunakan aplikasi pengukur jarak yang relevan, yaitu Google Maps. Menurut panduan menentukan lokasi zonasi dalam sistem informasi aplikasi pendidikan, cara menentukan lokasi zonasi adalah dengan menarik garis lurus dari sekolah ke alamat rumah calon siswa yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.